

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi kepada daerah memberikan kewenangan yang luas dan hak kepada daerah untuk mendapatkan sumber-sumber penerimaan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Penerimaan itu dalam bentuk dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan lainnya, seperti yang berasal dari dalam daerah sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan ini harus dikelola dengan baik oleh daerah untuk selanjutnya dipertanggung jawabkan kepada publik. Sebagai suatu bukti transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan.

Untuk dapat mewujudkan berhasilnya pelaksanaan program pemerintahan ini, adanya penatausahaan keuangan yang baik dan teratur merupakan suatu syarat yang sangat penting. Tata usaha keuangan yang baik dan teratur akan memungkinkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan dari penguasaan dan pengurusan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekuasaan Daerah disebut Tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.

Penatausahaan daerah digunakan dalam rangka memperlancar tercapainya tugas pada setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD). Penatausahaan terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Kota Padang seperti

halnya dengan daerah-daerah lain senantiasa mengarah pada perbaikan pola penatausahaan keuangan daerah guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan meningkatkan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan.

Belanja daerah adalah bagian dari keuangan daerah dan berada dalam ruang lingkup pengeluaran daerah. Dengan demikian maka penatausahaan belanja daerah juga merupakan bagian dari penatausahaan keuangan daerah.

Maka dengan diperlukannya penatausahaan belanja akhirnya penulis ingin mengetahui tentang tata cara atau proses dari penatausahaan keuangan itu sendiri khususnya penatausahaan belanja. Berdasarkan hal berikut dapat diangkat judul menarik yaitu “ **Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Padang**”

Dengan diangkatnya tema ini, diharapkan adanya kerjasama yang terjalin antara penulis dan pihak-pihak yang terkait di Dinas Pendidikan Kota Padang dalam pembuatan laporan magang ini. Sehingga penulis nantinya dapat memahami dan mengawasi tentang penatausahaan keuangan daerah pada SKPD yang berada di Kota Padang.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang**

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program Diploma III fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun tujuan magang yang hendak dicapai dalam kuliah kerja praktek/magang ini adalah :

- a. Melengkapakan SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Untuk mempraktekkan teori yang dicapai dalam perkuliahan kelapangan (Instansi Pemerintah) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- c. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.

- d. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkungan hidup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
- e. Untuk mengetahui dan memahami masalah-masalah dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan prosedur pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Padang.
- f. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Sedangkan manfaat magang ini antara lain :

1. Bagi Instansi  
Yaitu sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyempurnaan atas kekurangan yang mungkin ada.
2. Bagi penulis
  - a. Mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja serta pengaplikasian teori yang di dapat penulis dengan implementasinya di dunia kerja.
  - b. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai prosedur laporan pertanggungjawaban pada suatu instansi.
  - c. Melengkapi prasyarat sebelum menyelesaikan masa studi

### **1.3 Tempat dan Waktu Magang**

Sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh penulis, maka penulis berencana untuk melaksanakan magang yang sesuai dengan judul tugas akhir yang diajukan oleh penulis, yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kota Padang. Magang dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2016.

Selama pelaksanaan magang penulis dalam teorinya berlangsung selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik.